

News Title : Berjuang Cari Titik Temu

Media Name : Bisnis Indonesia

Journalist : Anitana W. Puspa, Aziz Rahardyan, Rahmad Fauzan

Publish Date : 23 October 2023

Tonality : Positive

News Page : 3

News Value : 375,000,000

Resources : M. Yunus (Wakil Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatra Selatan), Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan), Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Tungkot Sipayung (Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (Paspi) ), Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef))

Ads Value : 125,000,000

Section/Rubrication : Fokus

Topic : Bursa CPO



| BURSA CPO INDONESIA |

## BERJUANG CARİ TITIK TEMU

Komoditas kelapa sawit menjadi produk unggulan ekspor Indonesia. Dari sisi produksi, Indonesia merupakan pengusa utama dan menjadi tumpuan untuk memasok kebutuhan dari berbagai negara di dunia.

Anitana W. Puspa, Aziz Rahardyan & Rahmad Fauzan  
infobisnis@indonesiaindonesia.com

### BISNIS FOKUS

Wakil Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatra Selatan, M. Yunus.

Provinsi Sumatra Selatan (Sumse) termasuk dalam tiga besar daerah di Indonesia yang memiliki luas areal tanam dan produksi *crude palm oil* (CPO) tertinggi.

Yunus yang banyak berinteraksi dengan petani sawit swadaya menuturkan bahwa harga produk kelapa sawit atau CPO, belum sepenuhnya menguntungkan petani.

Menurutnya, harga tandan buah segar (TBS) untuk petani swadaya, memiliki gap dengan harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Misalnya, harga TBS untuk periode bulan kedua Oktober 2023 yang sebesar Rp2.286 per kg untuk sawit dengan usia tanam 10–20 tahun, harga di petani swadaya antara Rp1.900–Rp2.000 per kg.

"Karena harga itu untuk TBS plasma yang bernilai dengan perusahaan. Misalnya sekarang ditetapkan harga Rp2.300 per kilogram, di petani swadaya TBS bisa Rp1.900 atau Rp2.000 per kilogram," katanya kepada Bisnis, Jumat (20/10).

Selama ini, penetapan harga CPO menurut harga di pasar internasional, terutama yang bersumber dari Malaysia dan Rotterdam.

Yunus mendukung upaya Pemerintah Indonesia menghadirkan wadah perdagangan sawit lewat Bursa CPO Indonesia yang dipengadangkan melalui Indonesia Commodity & Derivatives Indonesia (ICDI). Hadirnya Bursa CPO itu diharapkan mampu memperbaiki harga di tingkat petani.

Mengutip data Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Indonesia merupakan negara dengan produksi CPO terbesar di dunia. Total produksi CPO dari Tanah Air mencapai 46,73 juta ton pada 2022 dengan area luas tanam hingga 12,34 juta hektare.

Menyusul Indonesia yakni Malaysia, Kolombia, Nigeria, dan Papua Nugini. (Lihat infografik)

Dari sisi permintaan, Ketua Umum Apkasindo Catur Manunggal menuturkan pembeli minyak sawit terbesar adalah China, India, dan negara-negara di Uni Eropa.

Kendati secara produksi masih be-

sar, dia menuturkan selama 3 tahun terakhir terjadi penurunan produksi CPO Indonesia yang disebabkan oleh tiga hal. Pertama, perubahan sawit rakyat yang memasuki masa *replanting* tetapi belum terlaksana. Kedua, perubahan sawit rakyat kesulitan melakukan pemupukan karena mahalnya harga pupuk pada saat turnnya.

Ketiga, menurutnya perawatan kebun rakyat karena harga TBS lebih rendah dari Harga Pokok Produksi.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyadai dengan potensi pasar CPO Indonesia. Sejak 14 Oktober 2023, pemerintah meluncurkan perdagangan pasar fisik CPO melalui ICDI.

Menurutnya, Indonesia berkontribusi lebih dari 50% kebutuhan CPO global. Namun, harga acuan yang dipakai untuk perdagangan masih mengacu pada harga negara lain.

"Indonesia belum memiliki harga acuan CPO, padahal Indonesia merupakan negara produsen CPO terbesar di dunia. Kami banyak mendapatkan keluhan dari pelaku usaha. Jika harga acuan bersumber dari negara lain, tidak tepat," kata Mendag.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko menuturkan hadirnya Bursa CPO Indonesia selanjutnya merupakan amanat dari undang-undang.

Kalau awal pembentukan Bursa CPO Indonesia dilakukan sejak awal 2023. Targetnya saat ini dapat beroperasi pada Juni 2023.

"Baru teralisasi akhir Oktober 2023," katanya.

Dia menyatakan banyak tarik ulur terkait dengan hadirnya Bursa CPO itu. Tak sedikit pelaku usaha yang berhitung dengan untung rugi melakukan transaksi perdagangan melalui bursa dalam negeri. Namun, hal itu dirasa wajar karena menguntungkan kepentingan bisnis.

"Simpel saja, pelaku usaha kan ujungnya profit. Sejahter tidak menguntungkan, mereka akan keberatan. Atau sejauh ini merugikan, mereka keberatan. Itu wajar. Karena pelaku usaha mencari keuntungan. Dengan keuntungan itu mereka bisa membayar pajak, negara bisa membangun dan seterusnya," ujarnya.

Didid menargetkan Bursa CPO Indonesia siap menjadi rujukan dalam pembentukan harga komoditas kelapa sawit pada kuartal I/2024.

Jika makin banyak pelaku usaha terlibat dan volume transaksi meningkat, target tersebut bisa berjalan lebih cepat.

"Saya optimistik, karena kami bisa buat transaksi perdana (Jumat pekan lalu). Sebelumnya lebih cepat dari target awal. Tapi, rencana diluncurkan di tanggal 23 Oktober 2023. Jadi

kalau semua siap, ada potensi bisa lebih cepat dari perkiraan," ujarnya.

INSENTIF

Agar kehadiran Bursa CPO Indonesia menjadi ramai, katanya pihaknya sedang mencari jalan tengah melalui pemberian insentif.

Menurutnya, banyak pelaku usaha yang melakukan kalkulasi untung rugi melakukan transaksi di Bursa CPO Indonesia.

"Kalau kami masuk bursa, apa untungnya bagi kami? Kemudian, kami sudah punya *longterm contract*, itu gimana? Kemudian ada lagi, selama ini tanpa masuk bursa kami sudah memiliki komitmen dengan *trader* besar. Kami mau produksi kami dapat *DP (down payment)*, ketika masuk bursa, siapa yang memberikan DP dari *buyer*? Kami nanti dapat modal kerja dari mana?" kata Didid.

Terkait dengan insentif, pihaknya akan terus berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk menarik minat pelaku usaha melakukan transaksi perdagangan di dalam negeri.

"Tentu kalau insentif terkait dengan fiskal, kami harus bicara dengan Kementerian Keuangan. Pembicaraan awal sudah, tapi belum detail. Sementara ini, kami akan membuat kajian bersama. Kita-kira apa sih kemungkinannya. Prinsipnya, bursa bisa secara bisnis juga," katanya.

Secara prinsip, Didid menjelaskan kehadiran Bursa CPO Indonesia untuk menghadirkan kestabilan harga dan membuka peluang di dalam negeri sehingga menciptakan ruang persaingan bisnis yang lebih.

"Harapannya, langkah ada lagi dari mereka yang sampai salah tangkap bahwa kalau ada bursa CPO dalam negeri, berarti harga akan tinggi. Tidak juga. Tapi bursa bisa memastikan harga akan *fair*," ujar Didid.

Selain itu, kata Didid hadirnya Bursa CPO dapat memberikan efek berganda yang berakumulasi sampai ke hulu dan ke petani kecil, serta memberikan dampak positif bagi pemerintahan negeri.

Selain itu, Bursa CPO lokal hanya memungkinkan transaksi perdagangan antara pembeli domestik, belum seperti bursa Rotterdam maupun Malaysia.

"Ke depan, akan mengarah ke internasional. Tapi sementara ini lokal dulu. Tapi kalau ekspor barangnya kurang, butuh tambahan supaya kapasitas ekspornya optimal, sekarang bisa beli di bursa. Jadi insentifnya, transaksi domestik untuk tujuan ekspor, *buyer* luar negeri memang belum memungkinkan untuk langsung bernilai di sini. Kalau *buyer* luar berminat, saat ini harus punya unit usaha di dalam negeri dulu," katanya.

Selain itu, bursa CPO di Indonesia

menggunakan mekanisme pengiriman produk fisik secara mandiri dari penjual kepada pembeli. Hal ini berbeda dengan bursa Rotterdam yang hanya memperdagangkan kontrak, sementara itu Bursa Malaysia menggunakan mekanisme pengumpulan produk ke dalam tangki bersama terlebih dahulu.

Kami hanya mengatur sisi prinsip, sementara teknis akan lebih banyak dipelajari di tata tertib bursa. Misalnya, soal pengecekan keaslian spesifikasi barang, bagaimana mekanisme komplain apabila pengiriman tidak sesuai, ketika ada pihak yang wanprestasi, dan lain-lain," katanya.

Jika bicara dari aspek keuntungan, Indonesia memiliki kelebihan teknis dari sisi zona waktu untuk menjalankan bursa, sama halnya dengan Malaysia.

"Sama-sama jadi yang paling timur, paling dihabiskan bukannya pedagang. Sehingga harga di sini berpotensi jadi *marker influencer* dunia. Terlebih, negara ini memang produsen CPO terbesar. Maka, kami dengan Malaysia juga harus membuka kolaborasi.

Terutama bagaimana bersama-sama menemukan pasar yang unik dan tidak saling menjerit-jerit," katanya.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (Paspi) Tungkot Sipayung menilai Bursa CPO Indonesia yang baru saja dibentuk mesti mampu menarik sebanyak mungkin penjual dan pembeli untuk bertransaksi di sana.

Menurutnya, hal tersebut bakal menentukan kredibilitas Bursa CPO sehingga pemain besar di industri CPO atau minyak kelapa sawit secara sah akan masuk untuk melakukan transaksi di wadah perdagangan anyar tersebut.

Pengelola Bursa CPO, bisa tidak mengajik pemain industri CPO besar yang menguasai ekspor ke dunia untuk secara sukarela masuk bursa?" kata Tungkot.

Berikut dengan upaya tersebut, sambungnya, tantangan bagi pengelola Bursa CPO di Tanah Air adalah bagaimana melakukan transaksi bahwa bertransaksi di wadah *made in Indonesia* itu lebih menguntungkan.

Adapun, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, hal terpenting dengan hadirnya Bursa CPO Indonesia yakni menciptakan transparansi pembentukan harga CPO dunia.

"Tantangnya adalah karena sama itu berlaku di 9 to 5 (*business to business*) bukan hanya perusahaan besar tapi juga perusahaan kecil banyak. Terus ada *trader* beragam. Kalau mereka semua tidak diizinkan, tak ada gunanya. Hanya bisa menjadi rujukan harga apabila seluruh produsen CPO ada di bursa," ujar dia.

